

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT DI
BANDUNG DAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI
DI JAKARTA**



PADA TANGGAL 05 S.D 08 JULI 2020

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG DAN
DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL DIREKTORAT JENDERAL
MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI
DI JAKARTA**

I. DASAR PELAKSANAAN

- 1. Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
04/DPRD/2010 Tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juli 2020;
- 3. Jadwal Kegiatan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juli 2020
- 4. Surat Tugas Dewan Nomor : 093/ /DPRD/2020 Tanggal Juli 2020
- 5. Surat Tugas Sekretariat Nomor : 094/ /Setwan/2020 Tanggal Juli 2020.

**II. TEMPAT, TANGGAL, WAKTU, MAKSUD/TUJUAN, ANGGOTA YANG
DITUGASKAN,
PEJABAT PENERIMA, HASIL PERTEMUAN DAN KESIMPULAN**

- ☐ Tempat : 1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI Di Jakarta
- ☐ Hari/Tanggal : Senin, 06 Juli 2020 dan Selasa, tanggal 07 Juli 2020
- ☐ Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
08.00 Wib s.d selesai
- ☐ Maksud dan Tujuan : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung dalam rangka mempelajari system Pelaporan yang berkenaan dgn Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan mendampingi Konsultasi Pimpinan DPRD Prov. Kep. Babel ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta terkait Implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam penatalaksanaan dan pengusahaan mineral Timah Khususnya dari Prov. Kep. Bangka Belitung

- Anggota Yang ditugaskan
1. EFREDY EFFENDY (KETUA KOMISI III DPRD)
 2. RINA TAROL, SE (Sek. KOMISI III DPRD)
 3. FIRMANSYAH LEVI (Anggota KOMISI III DPRD)
 4. IR. HENDRIYANSEN (Anggota KOMISI III DPRD)
 5. HERWINA(Notulis)

□ Pejabat / tokoh

Penerima di Tempat Tujuan: (Absensi Terlampir)

III. Hasil Pertemuan

Dari hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung dalam rangka mempelajari system Pelaporan yang berkenaan dgn Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan mendampingi Konsultasi Pimpinan DPRD Prov. Kep. Babel ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta terkait Implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam penatakelolaan dan pengusahaan mineral Timah Khususnya dari Prov. Kep. Bangka Belitung, dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

A. PERTEMUAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG

Dari hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung dalam rangka mempelajari system Pelaporan yang berkenaan dgn Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka mempelajari System Pelaporan yang berkenaan dengan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Peninjauan Lapangan Lokasi Pengolahan Sampah di Jawa Barat
- b. Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung di terimaoleh Kepala Dinas Provinsi Kep. Bangka Belitung Ibu Prima, dan sekaligus memaparkan tentang Dinas Lingkungan Hidup
- c. Disampaikan juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup memaparkan peran serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang persampahan dan perizinan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Barat
- d. Mengenai perizinan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak ada pelimpahan izin karena izin ada di kab/kota tidak bisa izin lingkungan di tarik oleh provinsi
- e. Konsekuensinya 10 krteria harus di penuhi untuk di dikeluarkan izin lingkungan dan tidak boleh kurang dari kriteria yang telah di tentukan, Apabila dokumen izin lingkungan kurang bagus dampaknya kurang bagus terhadap dokumen yang dikeluarkan

- f. Dokumen AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan Lokasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang
- g. Sebagai kontrol pihak kab/kota harus melibatkan provinsi terkait masalah perizinan. Komisi penilai amdal harus mengundang pihak provinsi, kab/kota.
- h. Selama ini Pemerintah tidak pernah mencabut izin beroperasinya tetapi menghentikan sementara kegiatan sampai perusahaan memenuhi tanggungjawabnya
- i. Disampaikan juga oleh Bpk Lufiandi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ada 5 lokasi pengolahan sampah yang ada di Provinsi Jawa Barat (TPPAS Regional Sarimukti, TPPAS Regional Lulut Nambo, TPPAS Regional Legok Nangka, TPPAS Regional Ciayumajakuning dan TPPAS Regional Berkapur
- j. Kenapa TPPAS karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ingin menggabungkan antara TPA TPSD terutamakota termasuk pendanaannya sangat minim sekali
- k. Provinsi harus membantu kab/kota terkait persampahan ini
- l. Mengapa memulai regionanalisis persampahan karena banyak yang melatar belakang terutama kab/kota sudah sangat sulit mencari tempat pengolahan sampah termasuk pendanaan karena satu kab tidak akansangup menanganipersampahan ini
- m. Pengolahan sampah harus dilaksanakan dengansecara professional dan rencana regionalisasi dan studinya sudah dipelajari sejak tahun 2002 dan hasil studi menjelaskan bahwa Provinsi harus membantu kab/kota
- n. Rencananya akan ada 4 lokasi regionalisasi TPPAS yang meliputi : Metropolitan Bandung, Metropolitan Bogor, Metropolitan Cirebon dan Wilayah Berkapur
- o. Legok Nangka sudah disiapkan bulan juni sudah beroperasi dan pihak swasta bisa menyelesaikan dengan segera permasalahannya
- p. Legok Nangka mash dalam proses lelang dan meminta subsidi dari Pemerintah Pusat dan masih dalam proses
- q. Di Provinsi regionalisasi persampahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kalau sudah fix akan diserahkan dan menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup.
- r. Sampah diolah menjadi LTS dan bahan bakarnya dari batubara dan akan di buat menjadi semen di kab bogor

B. PERTEMUAN DI DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI DI JAKARTA

Dari hasil mendampingi kunjungan kerja Ketua DPRD dan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta terkait Implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam penatakelolaan dan pengusahaan mineral Timah Khususnya dari Prov. Kep. Bangka Belitung , dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembukaan dari Bapak Yunus

Diperbolehkan untuk melakukan penjualan nanti akan terkena dengan namanya monitoring Modul Verifikasi Penjualan, LHP Akan Keluar apabila Asal usul barang jelas, Ketika Asal Usul Barang tidak jelas (IUP Timah ataupun lainnya) akan melahirkan LHPnya tidak keluar. dengan kebijakan Permen Nomor 25 dan 11 terbukti sejak tahun 2018 s/d skrg PNBPNegara Meningkat terkhususnya PNBPNegara Bangka Belitung Meningkat, dan mengurangi Ilegal Mining.

2. Bapak Didit Srigusjaya Ingin Menanyakan Peluang RKAB ?

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Merasakan Pendapatan dari Timah sangat Luar Biasa dan dari sisi Lingkungan Sudah Mulai Agak baik.

Saat DPRD Provinsi Bangka Belitung Mengunjungi PT. Timah untuk Mengadakan dialog dan Mendapatkan Paduan hukum mengetahui adanya Regulasi Dalam Ekspor Timah Sehingga Menimbulkan Pro Kontra karena menyangkut Pundi Pundi Masyarakat Bangka Belitung, Bagi Pemerintah Timah Harus di Selamatkan karena Timah Milik Negara.

Mempertanyakan Khusus Ketaatan Hukum dan masa Berlaku RKAB di Bangka Belitung.

3. Firmansyah Levi

Situasi di Babel Sejak Covid Khususnya Pelaku Pertambangan sejak di lakukan RKAB Pengusaha Menjerit, Pengusaha Meminta Supaya Mendapatkan Kemudahan atau Rehabilitasi.

Bagaimana Keputusan dari ESDM terkait Upaya Perusahaan Untuk Melakukan Rehabilitasi?

4. Rina Tarol

Bangka Belitung Ada 3 Perusahaan yang Melakukan Ekspor Tanpa melalui Aturan yang ditetapkan oleh ESDM, Apa Tindakan ESDM untuk Mencegah Hal Itu ?

Menurut Informasi ICDX Jakarta Mereka Tidak Berani Melakukan penampungan dan belum bertransaksi Karena kalau ICDX Menerima Barang Tanpa Tau Asal usulnya Akan Kena Sanksi

Bagaimana Mengatur Sumber daya Alam Ini agar Bisa Bermanfaat dan berkelanjutan? Berharap Agar ESDM Bisa Membantu Bangka Belitung Mengamankan dan Mengarahkan PT. Timah Agar IUP yang berpotensi agar tidak beralih ketangan orang asing.

5. Efredi Effendi

Masalah Mineral Logam Menurut Kepmen Nomor 1806 tahun 2018. Bagaimana sumber Mineral dapat kita aktif dan menjadi legal dan terampil Untuk dapat menambahkan pendapatan Asli Provinsi Babel Pasca Covid-19 yang Membuat terpuruk keuangan Provinsi Babel?

Bagaimana ESDM dapat Membantu Pemerintah yang mana daerah babel begitu banyak sumber daya mineral yang dapat mendukung perekonomian selain Timah?

6. Hendriyansen

Sumber Mineral ikutan sangat berharga drpd harga timah,Pemerintah Berharap ESDM Membatasi Ekspor dan efeknya membatasi penambangan dan menyimpan sumber daya Karena kalau tidak dibatasi itu mau dikemanakan Mineral Ikutannya dikarenakan bermanfaat untuk anak bangsa mempelajari ilmu logam

II. KESIMPULAN

1. Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Mendukung betul Terkait dengan legal aspek dari RKAB, RKAB diterbitkan apabila asal usul dari barang itu jelas, Asal usul barang jelas terdiri dari dipastikan sumber daya dan cadangan itu dari mana.sumberdaya dan cadangan itu jelas karena di edorse dari Verifikasi oleh Kompeten person, Biasanya mengenai khusus RKAB, Kalau RKAB 2018 disetujuinya 2017, Kalo kita berencana 2020 berarti dari bulan november/Desember 2019 sudah ditanda tangani untuk kedepan sedangkan RKAB 2018 disetujui 2020 sehingga menimbulkan keanehan.oleh karena itu dipastikan ini adalah asal usul barang harus jelas,dan aparat hukum mencari asal usul, Kalau IUP tidak jelas Maka RKAB Akan Gugur Dengan Sendirinya dan kalau RKAB tidak boleh maka transaksi Penjualan dan LHP (Laporan Hasil penjualan) dari Surveyor Tidak akan Jalan.
2. PT. Timah Komitmen dengan infarmen sedangkan yang lainnya biayanya tidak ada.
3. Terkait mengenai ekspor Terhadap 3 RKAB Sejauh yang diketahui ESDM belum Terjadi dan masih melalui Proses karena RKAB yang Ini pun belum Berani ICDX Menapungnya.dan akan dijegal dan tidak akan terjadi Pihak ESDM Akan Memberikan surat kepada Gubernur atau kepala Dinas Terkait Untuk Memastikan RKAB, Harus ada solusi Bagaimana harus Teregister bahwa IUP itu dari PT. Timah Maka Kompeten Person Adalah PT. Timah. Akhirnya nanti Legal akan ada kerja sama dengan Perusahaan sehingga pajak dan Lain-Lainnya Satu Pintu.
4. PT. Timah Sudah Melakukan satu Kajian dalam Mengelola Logam Tanah Jarang (Monazid), ESDM Mengusulkan kepada Kepala Deputi Menkomaritim untuk Membentuk Badan Pengumpul Yaitu PT. Timah. Dan kemudian PT. Timah Akan Membuat Industri Pengolah yang namanya Monazid Menjadi Karbonat.
5. Pemerintah Setuju Tidak Ada Rehabsasi apalagi menggugurkan yang Sudah Cukup Baik. ESDM Akan Melakukan Koordinasi Kepada Dinas ESDM Untuk Masalah RKAB dan Terkait Dengan Monazid dan Akan Berkonsultasi Ke MenkoPerekonomian dan Menko Maritim Kepada PT. Timah Untuk Mempercepat Ilirisasi Sehingga Perdagangan Bangka Belitung Terkontrol.

V. PENUTUP

Demikian disampaikan laporan hasil kunjungan kerja Ketua DPRD dan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung dalam rangka mempelajari system Pelaporan yang berkenaan dgn Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan mendampingi Konsultasi Pimpinan DPRD Prov. Kep. Babel ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta terkait Implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam penatakelolaan dan pengusahaan mineral Timah Khususnya dari Prov. Kep. Bangka Belitung disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Pangkalpinang, Juli 2020

KETUA KOMISI III

EFREDI EFFENDY

**LAMPIRAN FOTO DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT –
BANDUNG**



**LAMPIRAN FOTO DI DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL DIREKTORAT
JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI DI JAKARTA**



